



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA BADAN



**SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah	Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)	Nilai	21,97
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp27.632.003.424,00	APBD
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.636.053.618,00	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.400.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp32.668.057.042,00	

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN



**SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Sekretaris BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

SEKRETARIS


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,62
2	Terlaksananya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Presentase pelaksanaan pelayanan publik perangkat daerah	Persen	100
3	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah	Persen	100
4	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Persentase Perangkat Daerah Pelaksanaan Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Persen	100
5	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Kepala Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Kepala Perangkat Daerah per Triwulan	Persen	100
6	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Perangkat daerah	Persen	100
7	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Pada Bidang Sekretariat	Persen	100
8	Terlaksannannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 27.632.003.424,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp 27.632.003.424,00	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

SEKRETARIS


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAIFUL BAHRI, S.Hut, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pit.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**


Sy. VANESA VILNA SIS, S.E.M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


SAIFUL BAHRI, S.Hut, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197901032005021006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran RKPD dan RPJMD	Persen	100
		Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	Persen	100
		Persentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah	Persen	100
		Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)	Nilai	21,97
2	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah yang berdampak pada percepatan pencapaian kinerja dan perbaikan proses kerja	Ketersediaan Inovasi Perangkat daerah ada level Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
3	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100
4	Tersedianya Inovasi Perangkat Daerah yang berdampak pada percepatan pencapaian kinerja dan perbaikan proses kerja	Ketersediaan Inovasi Perangkat daerah ada level Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
		Persentase tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Pengendalian	Persen	100
5	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	100
		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100
6	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah per Triwulan	Persen	100

8	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penetapan Data Prioritas Tahunan	Persen	100
9	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100
		Terlaksananya rekomendasi kebijakan evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	Persen	100
10	Tersedianya Arsip Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Arsip Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp. 2.636.053.618,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 2.636.053.618,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


SAIFUL BAHRI, S.Hut, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197901032005021006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Plt.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197902022011011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
		Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
		Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP) Perangkat daerah di bawah Koordianasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai	19,15
2	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pengelolaan sistem irigasi secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	Persentase rekomendasi kebijakan pengelolaan sistem irigasi secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	Persen	100
3	Terwujudnya perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Persentase keselarasan rekomendasi kebijakan program kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Persen	100
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
		Persentase tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
5	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya Dokumen Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	100

		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
6	Tersedianya Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Persentase Ketersediaan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Persen	100
7	Tersedianya Arsip Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Dokumen	12
8	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayan	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayan per Triwulan	Persen	100
9	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Perangkat daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100
11	Terlaksananya Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Rp. 800.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 800.000.000,-	


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197902022011011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GAMAL ABDUL AZIZ., S.I.P,M.M**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


GAMAL ABDUL AZIZ., S.I.P,M.M
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198205102006041015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Organisasi	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
2	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia per Triwulan	Persen	100
3	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Perangkat daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Pemerintahan dan	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
5	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran RKPD dan RPJMD	Persen	100
		Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	Persen	100
		Persentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah	Persen	100
		Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)	Nilai	21,23

6	Terwujudnya perumusan strategi dan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	Persentase keselarasan rekomendasi kebijakan penurunan stunting dengan program prioritas daerah	Persen	100
7	Terwujudnya perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja penanggulangan kemiskinan	Persentase keselarasan rekomendasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan program prioritas daerah	Persen	100
8	Terwujudnya perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pengembangan kabupaten layak anak	Persentase keselarasan rekomendasi kebijakan program kerja pengembangan Kabupaten Layak Anak	Persen	100
9	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersedianya Dokumen Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Pemerintahan dan	Dokumen	1
		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
10	Tersedianya Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Ketersediaan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100
11	Tersedianya Arsip Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Arsip Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	12
12	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Tugas Kedinasan berdasarkan perintah atasan baik lisan maupun tulisan.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Kedinasan berdasarkan perintah atasan baik lisan maupun tulisan.	Laporan	24

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Rp. 2.636.053.618,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 2.636.053.618,-	


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG BIDANG
PERENCANAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN MANUSIA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


GAMAL ABDUL AZIZ., S.I.P,M.M
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198205102006041015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BAGUS EKO SAMPURNO, S.St,Pi**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SDA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


BAGUS EKO SAMPURNO, S.St,Pi
PENATA TK/I/ (III/d)
NIP. 198303302008011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang	Persen	100
		Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen	Nilai	20,14
2	Terwujudnya ketersediaan data dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data sembilan langkah kongkrit	Persen	100
		Persentase entri data pelaporan hasil sembilan langkah kongkrit melalui situs web: kendaliekonomi.kemen dagri.go.id paling lambat tanggal 20 setiap bulannya	Persen	100
		Persentase penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi atas capaian percepatan pertumbuhan ekonomi	Persen	100
		Persentase penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas	Persen	100
3	Terwujudnya keselarasan roadmap pengendalian Inflasi Daerah dengan program prioritas daerah	Persentase keselarasan roadmap pengendalian Inflasi Daerah dengan program prioritas daerah	Persen	100
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Persentase tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100

5	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1
		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
6	Tersedianya Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
7	Tersedianya Arsip Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Arsip Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	12
8	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam per Triwulan	Persen	100
9	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
10	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100

		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang	Persen	100
11	Terlaksananya Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Rp. 800.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 800.000.000,-	


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SDA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


BAGUS EKO SAMPURNO, S.St,Pi
PENATA TK/I/ (III/d)
NIP. 198303302008011008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURDIYANTO, S.STP,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).


Kutai Kartanegara, 6 Februari 2025


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SDA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


MURDIYANTO, S.STP,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198104032000121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang	Persen	100
		Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP) Perangkat daerah di bawah Koordianasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	20,14
2	Terwujudnya ketersediaan data dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data sembilan langkah kongkrit	Persen	100
		Persentase entri data pelaporan hasil sembilan langkah kongkrit melalui situs web: kendaliekonomi.kemen dagri.go.id paling lambat tanggal 20 setiap bulannya	Persen	100
		Persentase penyiapan bahan rapat koordinasi dan evaluasi atas capaian percepatan pertumbuhan ekonomi	Persen	100
		Persentase penyusunan dan pelaporan pelaksanaan tugas	Persen	100
3	Terwujudnya keselarasan roadmap pengendalian Inflasi Daerah dengan program prioritas daerah	Persentase keselarasan roadmap pengendalian Inflasi Daerah dengan program prioritas daerah	Persen	100
4	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100

		Persentase tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
5	Terlaksananya Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tersedianya Dokumen Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	1
		Persentase Rekomendasi Yang Sudah ditindak Lanjuti dari Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
6	Tersedianya Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
7	Tersedianya Arsip Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Arsip Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	12
8	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam per Triwulan	Persen	100
9	Terlaksananya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100

10	Terlaksananya Kepatuhan Input e- Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Pada Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100
		Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang	Persen	100
11	Terlaksananya Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Kedinasan yang di perintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SDA	Rp. 800.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 800.000.000,-	


Kutai Kartanegara, 6 Februari 2025

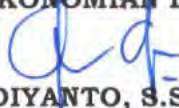
Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN SDA**


SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004


MURDIYANTO, S.STP,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 198104032000121006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALAKSANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197910042009012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Perjanjian Kinerja	Jumlah Laporan Perjanjian Kinerja	Laporan	7
2	Tersedianya Laporan Peremajaan data SIMPEG	Jumlah Laporan Peremajaan Data SIMPEG yang terverifikasi	Laporan	7
3	Tersedianya Laporan Sasaran Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Sasaran Kinerja Pegawai	Laporan	7
4	Tersedianya Laporan Anjab ABK	Jumlah Laporan Anjab ABK	Laporan	7
5	Tersedianya Laporan Pemangku Jabatan	Jumlah Laporan Pemangku Jabatan	Laporan	1
6	Tersedianya Laporan Pakta Integritas	Jumlah Laporan Pakta Integritas	Laporan	7
7	Tersedianya Laporan Daftar Urut Kepangkatan	Jumlah Laporan Daftar Urut Kepangkatan	Laporan	1
8	Tersedianya Laporan Indikator Kinerja Individu	Jumlah Laporan Indikator Kinerja Individu	Laporan	7

9	Tersedianya Laporan Penilaian SKP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penilaian SKP Perangkat Daerah	Laporan	12
10	Tersediannya Laporan Hukuman Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hukuman Disiplin ASN	Laporan	1
11	Tersedianya Laporan Presensi Kehadiran ASN	Jumlah Laporan Presensi Kehadiran ASN	Laporan	12
12	Tersedianya Laporan Perhitungan Kedisiplinan ASN	Jumlah Laporan Perhitungan Kedisiplinan ASN	Laporan	12
13	Tersedianya Laporan Perhitungan TPP ASN	Jumlah Laporan Perhitungan TPP ASN	Laporan	12
14	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	5
15	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	12

16	Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Kebijakan Pelayanan	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Kebijakan Pelayanan	Persen	100
17	Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Profesionalisme SDM	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Profesionalisme SDM	Persen	100
18	Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Persen	100
19	Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik	Persen	100
20	Ketersediaan dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Persentase sarana prasarana dan tindak lanjut Konsultasi dan Pengaduan	Persen	100
21	Tersedianya Pengelolaan Arsip Unit Kearsipan	Tersedianya Pengelolaan Arsip Unit Kearsipan	Dokumen	12
22	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Persen	100

		Persentase tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Persen	100
23	Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur penjaminan mutu layanan	Persentase Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur penjaminan mutu layanan	Persen	100
24	Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur Standar Operasional Prosedur	Persentase Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur Standar Operasional Prosedur	Persen	100
25	Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur Pendidikan dan Pelatihan	Persen	100
26	Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur	Persentase Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur	Persen	100
27	Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur budaya organisasi	Persentase Ketersediaan dokumen penilaian kematangan organisasi unsur budaya organisasi	Persen	100
28	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian per Triwulan	Persen	100

29	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan/ Bulanan	12
30	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen/ Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Rp. 60.000.000,-	APBD
2	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Rp. 200.000.000,-	APBD
3	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Rp. 570.612.000,-	APBD
4	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Rp. 2.029.920.000,-	APBD
5	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Rp. 205.870.120,-	APBD
6	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Rp. 208.122.620,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.274.524.740,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pit.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM,
KETATALAKSANAAN DAN
KEPEGAWAIAN**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197910042009012003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**



H.AJI MOHD. RONNY, SE, M. Si
PEMBINA TK. I (IV/a)
NIP. 197510102001121006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan dokumen RKBMD	Jumlah Laporan dokumen RKBMD	Laporan	2
2	Tersusunnya Laporan Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Laporan	1
3	Tersusunnya Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Laporan	1
4	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan	1
5	Tersusunnya Laporan Prognosis SKPD	Jumlah Laporan Prognosis SKPD	Laporan	1
6	Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Persentase Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Persen	100
7	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100
8	Tersedianya Arsip Dinamis Sub Bagian Keuangan dan Aset	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Sub Bagian Keuangan dan Aset	Dokumen	12

9	Terlaksananya Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah pada Sub Bagian Keuangan dan Aset	Persentase hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah pada Sub Bagian Keuangan dan Aset	Persen	100
10	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Keuangan dan Aset	Persentase Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Sub Bagian Keuangan dan Aset	Persen	100
11	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan (Bulanan)	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Plt.KEPALA BADAN

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET**




SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

H.AJI MOHD RONNY, SE, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/a)
NIP. 197510102001121006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIANSYAH,S.Hut**

Jabatan : **Jf PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SAIFUL BAHRI,S.Hut.M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja Tempat Saya Bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AJI SYAFRUDDIN, S.Sos.**

Jabatan : **Jf. PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


AJI SYAFRUDDIN, S.Sos.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197201262000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197902022011011001


AJI SYAFRUDDIN, S.Sos.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197201262000121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENDI HASARY, S.T.,M.T**

Jabatan : **Jf. PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ENDI HASARY, S.T.,M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP.197709112011011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Terlaksananya Laporan perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Jumlah Laporan perumusan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
5	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
6	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
7	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 150.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 150.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ENDI HASARY, S.T.,M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP.197709112011011001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JULIANSYAH, S.Sos.**

Jabatan : **Jf. PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


JULIANSYAH, S.Sos.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197007262010011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya rekomendasi kebijakan pengelolaan sistem irigasi secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	Jumlah Rekomendasi kebijakan pengelolaan sistem irigasi secara terpadu, partisipatif dan berkelanjutan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
5	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
6	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
7	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 150.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 150.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


JULIANSYAH, S.Sos.
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197007262010011003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YEANNIE ASFIANTI, SP**

Jabatan : **JF. PERENCANA AHLI MUDA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **PIt.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pit.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

JF. PERENCANA AHLI MUDA



YEANNIE ASFIANTI, SP
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197811162008012026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	1
2	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1
3	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Dokumen	1
4	Tersusunnya Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Jumlah Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Laporan	1
5	Tersusunnya Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Jumlah Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Dokumen	4
6	Tersusunnya Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1
7	Tersedianya Arsip Dinamis Perencanaan Program	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Perencanaan Program	Dokumen	12
8	Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur penilaian perencanaan	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur penilaian perencanaan	Persen	100

9	Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur monitoring dan pengendalian	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur monitoring dan pengendalian	Persen	100
10	Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur pengukuran kinerja	Persentase Ketersediaan dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur pengukuran kinerja	Persen	100
11	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Kepala Perangkat Daerah Per Triwulan	Dokumen	4
12	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Sekretaris	Jumlah Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Sekretaris Per Triwulan	Dokumen	4
13	Tersusunnya Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah	Laporan	1
14	Tersedianya data Perangkat Daerah yang tervalidasi, ter-update, dan terdokumentasi secara sistematis	Tingkat keterisian Data pada aplikasi	Persen	100
15	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan (Bulanan)	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Rp. 50.000.000,-	APBD
2	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN	Rp. 150.000.000,-	APBD
3	KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA	Rp. 150.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 350.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pit.KEPALA BADAN

JF. PERENCANA AHLI MUDA



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

YEANNIE ASFIANTI, SP
PENATA TK. I (III/d)
NIP. 197811162008012026

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:


1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUAN DAERAH**


SAIFUL BAHRI, S.Hut.M.Si
PEMBINA(IV/a)
NIP. 197901032005021006

Pihak Pertama,

Jf PERENCANA AHLI MUDA


SURIANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197303102000121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya analisis keselarasan RPJMD 2025-2029 dan RKPD	Jumlah Laporan Keselarasan	Laporan (2027 dan Perubahan 2026)	2
2	Tersedianya analisis keselarasan RKP dan RKPD	Jumlah Laporan Keselarasan	Laporan (2027 dan Perubahan 2026)	2
3	Tersedianya analisis keselarasan RKPD Prov Kaltim dan RKPD	Jumlah Laporan Keselarasan	Laporan (2027 dan Perubahan 2026)	2
4	Tersedianya data analisis target program prioritas daerah	Jumlah Laporan	Laporan (2027 dan Perubahan 2026)	2
5	Tersedianya analisis dan rekomendasi rencana tindak pencapaian target SAKIP 2026	Jumlah Laporan	Laporan	1
6	Tersedianya analisis dan rekomendasi target SAKIP 2027	Jumlah Laporan	Laporan	1
7	Tersedianya Desain Inovasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Inovasi	Dokumen	1
8	Tersedianya Desain Inovasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Inovasi	Dokumen (Trilwulan)	4
9	Terlaksananya survey IKM pada layanan pembinaan penggunaan sistem informasi pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan (Perbulan)	12
10	Tersedianya rekomendasi tindak lanjut hasil forum konsultasi publik	Jumlah Laporan	Laporan	1
11	Tersedianya manajemen resiko pada sub kegiatan dalam menukung kinerja output	Jumlah Laporan manajemen resiko per sub kegiatan	Laporan (1 (Sub Kegiatan per semester)	2

12	Terselenggaranya seluruh tahapan pelaksanaan sub kegiatan yang ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tahapan	Laporan (Bulanan)	12
13	Tersedianya analisis revid data proyeksi pada dokumen rencana (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Laporan Review	Laporan	4
14	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan (Bulanan)	12
15	Terlaksananya tertib administrasi kearsipan sesuai tanggung jawab penugasan	Jumlah Laporan Arsip	Laporan (Bulanan)	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH	Rp. 214.215.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 214.215.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH**

Jf PERENCANA AHLI MUDA


SAIFUL BAHRI, S.Hut.M.Si
PEMBINA(IV/a)
NIP. 197901032005021006


SURIANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197303102000121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LI 'ATUN , S.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pi.t.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **A. FAHRIAH HANIM, A.Ma, S.Pd.I**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY ISNAWATI
SYAFRIL., SE., M.M.**

Jabatan : **Pit.KEPALA BADAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



A. FAHRIAH HANIM, A.Ma,
S.Pd.I
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197403142008012013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya arsip dinamis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah arsip dinamis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Dokumen	1
2	Tersedianya arsip dinamis Dokumen Rencana Kerja	Jumlah arsip dinamis Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1
3	Tersedianya arsip dinamis Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Jumlah arsip dinamis Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Dokumen	1
4	Tersedianya arsip dinamis Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Jumlah arsip dinamis Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Dokumen	1
5	Tersedianya arsip dinamis Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Jumlah arsip dinamis Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Dokumen	4
6	Tersedianya arsip dinamis Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah arsip dinamis Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Plt.KEPALA BADAN

SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


A. FAHRIAH HANIM, A.Ma,
S.Pd.I
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197403142008012013

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pit.KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



LI 'ATUN, S.T
PENATA MUDA TK. (III/c)
NIP. 197901232009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	1
2	Tersedianya Data dan Informasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Laporan Rencana Kerja Tahunan (RKT)	Laporan	1
5	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Jumlah Data dan Informasi Dokumen RKA, RKAP dan DPA, DPPA	Dokumen	4
6	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Laporan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4
7	Tersedianya data dan informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur penilaian perencanaan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur penilaian perencanaan	Persen	100
8	Tersedianya Data dan Informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur monitoring dan pengendalian	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur monitoring dan pengendalian	Persen	100

9	Tersedianya Data dan Informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur pengukuran kinerja	Persentase ketersediaan data dan informasi terkait dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur pengukuran kinerja	Persen	100
10	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Kepala Perangkat Daerah	Laporan	4
11	Tersedianya Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Sekretaris	Jumlah Data dan Informasi Penyusunan Dokumen Pengelolaan Manajemen Resiko Sekretaris	Laporan	4
12	Tersedianya Data dan Informasi penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPntah (SPIP)	Jumlah Data dan Informasi penyusunan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP)	Laporan	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Pit.KEPALA BADAN

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN




SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

LI 'ATUN, S.T
PENATA MUDA TK. (III/c)
NIP. 197901232009022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUNASIPAH, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RATNA AGUSTINA, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


RATNA AGUSTINA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197001012001122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	12
2	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
3	Tersedianya Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Jumlah Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Dokumen	1
5	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


RATNA AGUSTINA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197001012001122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROBBY FAUZI AKBAR**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



ROBBY FAUZI AKBAR
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198905142025211035

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Dokumen	12
3	Terfasilitasinya Pemindahan BMD	Jumlah Pelaksanaan Pemindahan BMD	Dokumen	12
4	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dokumen	12
6	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Dokumen	48
7	Tersedianya Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Jumlah Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
8	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

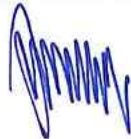
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



ROBBY FAUZI AKBAR
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198905142025211035



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakanyang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

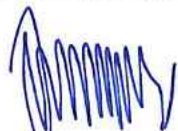
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197102012000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
5	Tersedianya Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	12
6	Tersedianya Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4
	Tersedianya Dokumen Penghargaan ASN	Jumlah Dokumen Penghargaan ASN	Dokumen	2
7	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
8	Tersedianya Data dan Informasi hasil SKM	Jumlah Data dan Informasi hasil SKM	Dokumen	12
9	Tersedianya data dan informasi Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Jumlah Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Dokumen	1

10	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12
----	---	--	------------------	----

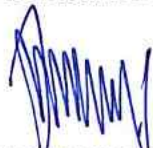
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI




IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197102012000122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARYONO**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



SUMARYONO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197112172007011018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	Jumlah Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	Dokumen	12
3	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
4	Tersedianya Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dokumen	12
5	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


SUMARYONO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197112172007011018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL ANWAR**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


SYAIFUL ANWAR
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197612052007011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Rekapitulasi	12
2	Tersedianya Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Jumlah Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Rekapitulasi	12
3	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitasi Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
4	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SYAIFUL ANWAR
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197612052007011019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULPINUSAR, S.Sos**

Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

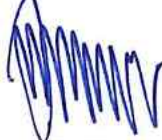
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Dokumen	4
2	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Dokumen	4
3	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Dokumen	12
4	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Dokumen	4
6	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Dokumen	12
7	Tersedianya Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Dokumen	12
8	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
9	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Jumlah dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
10	Tersedianya Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Jumlah Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Dokumen	2

11	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Jumlah Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Dokumen	1
12	Tersedianya Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Jumlah Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Dokumen	1
13	Tersedianya Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
14	Tersedianya Draft Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan)	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan) per Triwulan	Dokumen	4
15	Tersedianya draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Dokumen	4
16	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen/ Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 94.901.800,-	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.800.000.000	APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.264.665.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.159.566.800	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



**IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003**

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDI FAUZI,S.E**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

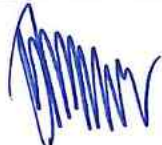
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ANDI FAUZI, S.E
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 197204222007011020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Alih media Scanning (Digital Arsip) Inaktif	Jumlah Dokumen Alih media Scanning (Digital Arsip) Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Jumlah Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Rekapitulasi	12
3	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

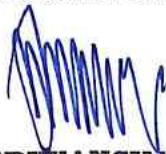
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



ANDI FAUZI, S.E
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 197204222007011020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARIEF RAHMAN**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ARIEF RAHMAN
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198611072025211017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BENY NOVARI, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


BENY NOVARI, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 198311092009011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Dokumen	4
2	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Dokumen	4
3	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Dokumen	12
4	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Dokumen	4
6	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Dokumen	12
7	Tersedianya Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Dokumen	12
8	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
9	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Jumlah dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
10	Tersedianya Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Jumlah Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Dokumen	2

11	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Jumlah Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Dokumen	1
12	Tersedianya Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Jumlah Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Dokumen	1
13	Tersedianya Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
14	Tersedianya Draft Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan)	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan) per Triwulan	Dokumen	4
15	Tersedianya draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Dokumen	4
16	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen/ Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003


BENY NOVARI, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 198311092009011004

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rp. 645.808.000	APBD
2	Pengadaan Mebel	Rp. 270.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Mebel	Rp. 25.000.000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 2.170.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.110.808.000	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


BENY NOVARI, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 198311092009011004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BRATA DWI SIRWENDA**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



BRATA DWI SIRWENDA
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198404012025211040

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	Jumlah Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	12 Dokumen	12 Dokumen
2	Tersedianya Laporan Pemeliharaan, perawatan dan Peremajaan Jaringan Internet	Jumlah Laporan Pemeliharaan, perawatan dan Peremajaan Jaringan Internet	12 Dokumen	12 Dokumen
3	Tersedianya Laporan Pemeliharaan, Perawatan dan Peremajaan sarana rapat	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Perawatan dan Peremajaan sarana rapat	12 Dokumen	12 Dokumen
4	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	48 Dokumen	48 Dokumen
5	Tersedianya Draf dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Jumlah Draf dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	1 Dokumen	1 Dokumen
6	Tersedianya Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan,	Jumlah Draf Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan,	1 Dokumen	1 Dokumen
7	Tersedianya Dokumen Pendukung Penyusunan SOP	Jumlah Dokumen Pendukung Penyusunan SOP	1 Dokumen	1 Dokumen
8	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	12 Dokumen /Laporan	12 Dokumen /Laporan

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


BRATA DWI SIRWENDA
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198404012025211040



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FERRI AZWAR**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakanyang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


FERRI AZWAR
Pengatur (II/c)
NIP. 198101232010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draf Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026	Jumlah Dokumen Draf Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026	Dokumen	4
2	Teverifikasinya Data dan Informasi Peremajaan data ASN pada Aplikasi SIMPEG Tahun 2026	Jumlah Peremajaan data ASN pada Aplikasi SIMPEG	Dokumen	12
3	Tersedianya Data dan Informasi Draf Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026	Dokumen	4
4	Tersedianya Data dan Informasi Draf Anjab ABK Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Anjab ABK Tahun 2026	Dokumen	4
5	Tersedianya Data dan Informasi Draf Pemangku Jabatan Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Pemangku Jabatan Tahun 2026	Dokumen	4
6	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026	Dokumen	4
7	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Daftar Urut Kepangkatan ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Dokumen Daftar Urut Kepangkatan ASN Tahun 2026	Dokumen	4
8	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026	Dokumen	4
9	Tersedianya Data dan Informasi Draf Penilaian SKP Perangkat Daerah ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draf Penilaian SKP Perangkat Daerah ASN Tahun 2026	Dokumen	12
10	Tersedianya Draf dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Jumlah Draf dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Dokumen	1

11	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Presensi Kehadiran ASN	Jumlah Dokumen Presensi Kehadiran ASN	Dokumen	12
12	Tersedianya Draf Dokumen Perhitungan Kedisiplinan ASN	Jumlah Draf Dokumen Perhitungan Kedisiplinan ASN	Dokumen	12
13	Tersedianya Draf Lapaoran Perhitungan TPP ASN	Jumlah Draf Lapaoran Perhitungan TPP ASN	Draf Laporan	12
14	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
15	Tersedianya Draf Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Draf Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
16	Tersedianya Draf Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Draf Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
17	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


FERRI AZWAR
Pengatur (II/c)
NIP. 198101232010011022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARIYATI, S.H**

Jabatan : **Penata Layanan Operasional**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

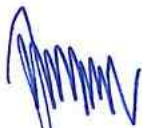
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003



HARIYATI, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199201132025212066

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
3	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
4	Tersedianya Draft Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Subbagian keuangan dan Aset	Jumlah Draft Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Subbagian keuangan dan Aset	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Jumlah Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Dokumen	1
6	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003



HARIYATI, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199201132025212066



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOKO PRATOMO**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

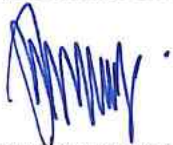
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



JOKO PRATOMO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197205192007011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dukung hasil SKM	Jumlah Data dukung hasil SKM	Dokumen	12
2	Tersedianya Draf Dokumen Pendukung Tindak lanjut hasil SKM	Jumlah Draf Dokumen Pendukung Tindak lanjut hasil SKM	Dokumen	1
3	Tersedianya Draf dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Jumlah dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	12
		Jumlah Dokumen tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat dan Survey Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
5	Tersedianya Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan,	Jumlah Draf Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan,	Dokumen	1
6	Tersedianya Draf Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Draf Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
7	Tersedianya Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Jumlah Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Dokumen	1
8	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



**IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003**

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**JOKO PRATOMO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197205192007011019**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KUSNADI**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


KUSNADI
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
NIP. 197805152007011039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Dokumen	12
3	Terfasilitasinya Pemindahan BMD	Jumlah Pelaksanaan Pemindahan BMD	Dokumen	12
4	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
5	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Dokumen	48
6	Tersedianya Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Jumlah Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
7	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


KUSNADI
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
NIP. 197805152007011039



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARIANTY DINNAH, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


MARIANTY DINNAH, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198302262009022002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1
5	Tersedianya Draft Laporan Arsip Aktif Perangkat Daerah	Jumlah Draft Laporan Arsip Aktif Perangkat Daerah	Dokumen	12
6	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
7	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
8	Tersedianya Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan Publik	Jumlah Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan Publik	Dokumen	1

9	Tersedianya Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Jumlah Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Dokumen	1
10	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



MARIANTY DINNAH, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198302262009022002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MULATI RIZKIMARDINI**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRNWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


MULATI RIZKIMARDINI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198503062006042006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
5	Tersedianya Draft dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Jumlah Draft dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Dokumen	1
6	Tersedianya Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Sekretariat	Jumlah Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Sekretariat	Dokumen	12
7	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
8	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
9	Tersedianya Draft Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Draft Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

10	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12
----	---	--	------------------	----

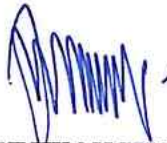
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

MULATI RIZKIMARDINI
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 198503062006042006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NORLAILA, S.Pd.I**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

NORLAILA, S.Pd.I
Penata Muda (III/a)
NIP. 198002182009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
5	Tersedianya Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	12
6	Tersedianya Draft Laporan Cuti ASN	Jumlah Draft Laporan Cuti ASN	Laporan	12
7	Tersedianya Laporan KGB ASN	Jumlah Laporan KGB ASN	Laporan	12
8	Tersedianya Dokumen Daftar Monitoring Pensiun 2026	Jumlah Dokumen daftar Monitoring Pensiun 2026	Dokumen	1
9	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12

10	Tersedianya Draf Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Jumlah Draf Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Dokumen	1
11	Tersedianya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat	Jumlah Hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Sekretariat	Dokumen	12
12	Tersedianya Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1
13	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



NORLAILA, S.Pd.I
Penata Muda (III/a)
NIP. 198002182009022001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURALISA, S.H**

Jabatan : **Penata Layanan Operasional**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003



NURALISA, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199006102025212033

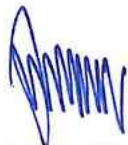
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
3	Terfasilitasinya Dokumen Yang di Tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang di Tanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah	Dokumen	25
4	Tersedianya Laporan Perjalanan Dinas Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Kepala Perangkat Daerah	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumen Rapat Internal Kepala Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rapat Internal Kepala Perangkat Daerah	Dokumen	12
6	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
PENATA TK.I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENATA LAYANAN OPERASIONAL



NURALISA, S.H
Penata Muda (III/a)
NIP. 199006102025212033



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RATNA AGUSTINA, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


RATNA AGUSTINA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197001012001122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	12
2	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
3	Tersedianya Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Draf Dokumen pendukung penilaian kematangan organisasi unsur manajemen SDM yang terukur Indikator Data pemanfaatan sarpras bidang Umum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	1
4	Tersedianya Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Jumlah Dokumen Bukti Dukung Nilai-nilai budaya kerja organisasi ,Kode etik dan kode perilaku ASN ,Dokumentasi kampanye budaya organisasi	Dokumen	1
5	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


RATNA AGUSTINA, S.Sos
Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP. 197001012001122003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROBBY FAUZI AKBAR**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



ROBBY FAUZI AKBAR
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198905142025211035

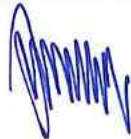
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumentasi Pengadaan BMD, Pemeliharaan BMD	Dokumen	12
3	Terfasilitasinya Pemindahan BMD	Jumlah Pelaksanaan Pemindahan BMD	Dokumen	12
4	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dokumen	12
6	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Apel dan hari hari besar	Dokumen	48
7	Tersedianya Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Jumlah Dokumentasi Bukti dukung Indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
8	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



ROBBY FAUZI AKBAR
Pengatur Muda (II/a)
NIP. 198905142025211035



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakanyang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

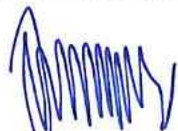
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197102012000122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	1
5	Tersedianya Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Jumlah Draft Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Dokumen	12
6	Tersedianya Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4
	Tersedianya Dokumen Penghargaan ASN	Jumlah Dokumen Penghargaan ASN	Dokumen	2
7	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
8	Tersedianya Data dan Informasi hasil SKM	Jumlah Data dan Informasi hasil SKM	Dokumen	12
9	Tersedianya data dan informasi Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Jumlah Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Dokumen	1

10	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12
----	---	--	------------------	----

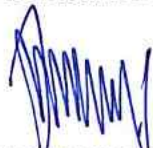
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Hj. SRI MUNARTY, SE, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197102012000122002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUMARYONO**

Jabatan : **Pengadministrasi Perkantoran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



SUMARYONO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197112172007011018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	Jumlah Dokumentasi Rapat Rapat dan Koordinasi	Dokumen	12
3	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitas Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
4	Tersedianya Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Dokumentasi Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Dokumen	12
5	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


SUMARYONO
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197112172007011018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL ANWAR**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


SYAIFUL ANWAR
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197612052007011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Jumlah Dokumen Penataan dan Penyimpanan Arsip Aktif dan Inaktif	Rekapitulasi	12
2	Tersedianya Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Jumlah Rekapitulasi Surat Masuk Manual	Rekapitulasi	12
3	Terfasilitasinya Persiapan Sarana Rapat	Jumlah Fasilitasi Persiapan Sarana Rapat	Dokumen	12
4	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



SYAIFUL ANWAR
Pengatur Tingkat I (II/d)
NIP. 197612052007011019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VIONA FATMASARI, S.P**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

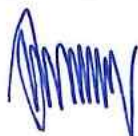
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003



VIONA FATMASARI, S.P
Penata (III/c)
NIP. 198110082000032002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Tersedianya Data dan Informasi Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026	Jumlah Dokumen Draft Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026	Dokumen	3
2	Terverifikasinya Data dan Informasi Peremajaan data ASN pada Aplikasi SIMPEG Tahun 2026	Jumlah Peremajaan data ASN pada Aplikasi SIMPEG	Dokumen	12
3	Tersedianya Data dan Informasi Draft Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2026	Dokumen	3
4	Tersedianya Data dan Informasi Draft Anjab ABK Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Anjab ABK Tahun 2026	Dokumen	3
5	Tersedianya Data dan Informasi Draft Pemangku Jabatan Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Pemangku Jabatan Tahun 2026	Dokumen	3
6	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026	Dokumen	3
7	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Daftar Urut Kepangkatan ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Daftar Urut Kepangkatan ASN Tahun 2026	Dokumen	3
8	Tersedianya Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026	Jumlah Data dan Informasi Draft Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026	Dokumen	3
9	Tersedianya Draft dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Jumlah Draft dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN	Dokumen	1
10	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
11	Tersedianya data dan informasi Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Jumlah Dokumen Pendukung Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan	Dokumen	1

12	Tersedianya Draf Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Draf Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
13	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

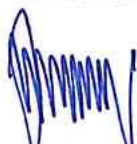
Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003**



**VIONA FATMASARI, S.P
Penata (III/c)
NIP. 198110082000032002**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZULPINUSAR, S.Sos**

Jabatan : **Penelaah Teknis Kebijakan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **IIS SRIWANSYAH, S.Hut.**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bekerja.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

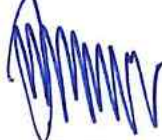
1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003

Pihak Pertama,

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Gedung	Dokumen	4
2	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Elektronik	Dokumen	4
3	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan air, listrik, internet, telpon	Dokumen	12
4	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional	Dokumen	12
5	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan BMD	Dokumen	4
6	Tersedianya Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Pemeliharaan Jaringan website Bappeda	Dokumen	12
7	Tersedianya Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Jumlah Dokumen Pengawasan jasa pelayanan umum	Dokumen	12
8	Terkelolanya surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran	Jumlah surat menyurat dan dokumen administrasi perkantoran yang di susun/buat	Dokumen	12
9	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Jumlah dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Sarana Prasarana	Dokumen	1
10	Tersedianya Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Jumlah Draft Data dan Informasi Pendukung Sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan	Dokumen	2

11	Tersedianya Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Jumlah Draft dokumen pendukung pengendalian Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan indikator Konsultasi dan Pengaduan	Dokumen	1
12	Tersedianya Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Jumlah Draft Dokumen Pendukung , Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan	Dokumen	1
13	Tersedianya Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Draft Dokumen Daftar SOP layanan dan administrasi Perangkat Daerah	Dokumen	1
14	Tersedianya Draft Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan)	Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko pada Sub Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian (Subkegiatan) per Triwulan	Dokumen	4
15	Tersedianya draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah draft data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Dokumen	4
16	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen/ Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 94.901.800,-	APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.800.000.000	APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.264.665.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.159.566.800	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


ZULPINUSAR, S.Sos
Penata Muda (III/a)
NIP. 197905202007011004

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003


MUNASIPAH, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196902082000122001

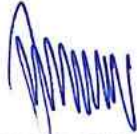
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Data dan Informasi Draf Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Draf Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1
2	Tersedianya Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pendukung Peremajaan Data ASN bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1
3	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Draf Dokumen Pakta Integritas ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1
4	Tersedianya Data dan Informasi Draf Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Draf Dokumen Indikator Kinerja Individu ASN Tahun 2026 bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1
5	Tersedianya Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Draf Laporan Arsip Aktif Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	12
6	Tersedianya Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pengadministrasian Sub Kegiatan pada Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Dokumen	2
7	Tersedianya Draf Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen pendukung pengembangan kompetensi SDM Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Dokumen	1
8	Terkoordinasikannya Pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

**Kepala Sub Bagian Umum,
Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian**



**IIS SRIWANSYAH, S.Hut
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197910042009012003**

Pihak Pertama,

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



**MUNASIPAH, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 196902082000122001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DITA DARINI, S.E**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUSTINAH, S.Sos.**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


AGUSTINAH, S.Sos.
NIP. 197508072001122002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen data pengeluaran dan jenis pengeluaran	Jumlah dokumen data pengeluaran dan jenis pengeluaran	Dokumen	12
2	Tersedianya Laporan hasil identifikasi data keuangan	Jumlah Laporan hasil identifikasi data keuangan	Laporan	12
3	Terlaksananya tertib administrasi kearsipan sesuai tanggung jawab penugasan	Jumlah Laporan Arsip	Laporan (Bulanan)	12
4	Terlaksananya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen / Laporan	12


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

**PENGADMINISTRASI
PERKANTORAN**


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


AGUSTINAH, S.Sos.
NIP. 197508072001122002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ALAMSYAH, S.E**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

ALAMSYAH, S.E
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197403272007011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Draft Laporan dokumen RKBMD	Jumlah Draft Laporan dokumen RKBMD	Laporan	1
		Jumlah Draft Laporan dokumen Perubahan RKBMD	Laporan	1
2	Tersusunnya Draft Laporan Penatausahaan BMD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	Laporan	1
3	Tersusunnya Draft Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Jumlah Draft Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	Laporan	1
4	Tersusunnya Draft Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Draft Laporan Keuangan SKPD	Laporan	1
5	Tersedianya Jumlah Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulanan / Tahunan (Fungsional Operasional Administratif)	Jumlah Dokumen Pendukung Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulanan / Tahunan (Fungsional Operasional Administratif)	Dokumen	12
6	Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Dokumen	1
7	Tersedianya manajemen risiko pada sub kegiatan dalam menjangk kinerja output	Jumlah Laporan manajemen resiko per sub kegiatan	Laporan	2

8	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan	12
9	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 17,853,303,884.00	APBD
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 13,200,000.00	APBD
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 50,000,000.00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 17,916,503,884.00,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

ALAMSYAH, S.E
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 197403272007011022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDDY HARDADI**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

DEDDY HARDADI
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197805302007011015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Draft Laporan dokumen RKBMD	Jumlah Draft Laporan dokumen RKBMD	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Jumlah Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Dokumen	12
3	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DEDDY HARDADI
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197805302007011015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEWI KUMALASARI**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DEWI KUMALASARI
NIP. 24690130820001700

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen SPM dan SP2D	Jumlah Dokumen SPM dan SP2D	Dokumen	12
2	Terlaksananya tertib administrasi kearsipan sesuai tanggung jawab penugasan	Jumlah Laporan Arsip	Laporan (Bulanan)	12
3	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen / Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL


H. AJI MOHD BONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DEWI KUMALASARI
NIP. 24690130820001700



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DINA KATARINA, S.E**
Jabatan : **PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pengolah Data Dan Informasi

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006

DINA KATARINA, S.E
NIP. 197810122008012026

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS .	Jumlah Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Jumlah Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Dokumen	12
3	Tersedianya Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Jumlah Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Dokumen	12
4	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan	Laporan (Perbulan)	12
5	Terlaksannannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen / Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pengolah Data Dan Informasi


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DINA KATARINA, S.E
NIP. 197810122008012026



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FACHRUDDIN HASAN**
Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

H. AJI MOHD RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006

FACHRUDDIN HASAN
NIP. 198601222026211034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Jumlah Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Dokumen	12
2	Tersedianya manajemen risiko pada sub kegiatan dalam menukung kinerja output	Jumlah Laporan manajemen resiko per sub kegiatan	Laporan (1 Sub Kegiatan per semester)	2
3	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen / Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENATA LAYANAN OPERASIONAL


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


FACHRUDDIN HASAN
NIP.198691222925211034



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAIRULLAH**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

HAIRULLAH
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197812062007011008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Draft Laporan Prognosis SKPD	Jumlah Laporan Prognosis SKPD	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Jumlah Dokumen Tindak Lanjut Atas Permintaan Auditor	Dokumen	1
3	Tersusunnya Laporan Bulanan Bendahara	Jumlah Laporan Bulanan Bendahara	Laporan	12
4	Tersedianya Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Jumlah Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan	12
5	Tersedianya Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD)	Dokumen	4
6	Tersedianya Jumlah Dokumen Kertas Kerja Anggaran Kas SKPD	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Anggaran Kas SKPD	Dokumen	2
7	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


HAIRULLAH
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197812062007011008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABDUL HALIM, S.Sos**

Jabatan : **Pengolah Data Dan Informasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pengolah Data Dan Informasi


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


ABDUL HALIM, S.Sos
NIP. 197107192000121004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Draft Laporan dokumen RKBMD	Jumlah Draft Laporan dokumen RKBMD	Laporan (Perubahan)	1
2	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen /Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006

Pihak Pertama,
Pengolah Data Dan Informasi


ABDUL HALIM, S.Sos
NIP. 197107192000121004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARDIANTO**

Jabatan : **PENGELOLA DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pengolah Data Dan Informasi


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


HARDIANTO
NIP. 198003022009021001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Perawatan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	12
2	Terlaksananya tertib administrasi kearsipan sesuai tanggung jawab penugasan	Jumlah Laporan Arsip	Laporan (Bulanan)	12
3	Terlaksannanya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokuman / Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Aset

Pengolah Data Dan Informasi


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


HARDIANTO
NIP. 198003022009021001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. ASMAWATI SINANTA, S.Sos.,M.Si**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

Hj. ASMAWATI SINANTA, S.Sos.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197402031996032003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Jumlah Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Jumlah Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Dokumen	12
3	Tersedianya Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Jumlah Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Dokumen	12
4	Terlaksananya tertib administrasi kearsipan sesuai tanggung jawab penugasan	Jumlah Laporan Arsip	Laporan	12
5	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	12
6	Terlaksananya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Laporan	12

Kutai Kartanegara, Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASSET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


Hj. ASMAWATI SINANTA, S.Sos.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197402031996032003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARTINI, S.Sos.**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


KARTINI, S.Sos.
NIP. 197003172000122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS Bidang.	Jumlah Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Jumlah Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Dokumen	12
3	Tersedianya Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Jumlah Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Dokumen	12
4	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan (Perbulan)	12
5	Terlaksanannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen / Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 197510102001121006


KARTINI, S.Sos.
NIP. 197003172000122005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PAHRURROZI**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006

PAHRURROZI
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 198308042010011013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya Laporan Realisasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Laporan Reliasasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	Laporan	14
2	Tersusunnya Dokumen Pendukung Permintaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Dokumen Pendukung Permintaan Gaji dan Tunjangan	Dokumen	14
3	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	12
4	Terlaksannannya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


PAHRURROZI
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 198308042010011013



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **VERANYTHA, S.E**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja yang saya pimpin.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


VERANYTHA, S.E
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198102172010012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Jumlah Dokumen data transaksi dan data pendukung transaksi pajak	Dokumen	12
2	Terlaksananya pengisian formulir laporan pajak (SPT Masa Pajak Bulanan)	Jumlah dokumen pengisian formulir laporan pajak (SPT Masa Pajak Bulanan)	Dokumen	12
3	Tersedianya dokumen bukti pembayaran pajak	Jumlah dokumen bukti pembayaran pajak	Dokumen	12
4	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	12
5	Terlaksananya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Dokumen	12


Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


VERANYTHA, S.E
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198102172010012003

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI

H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DITA DARINI, S.E
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198005102011012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Jumlah Dokumen Permintaan Pencairan GU dan LS	Dokumen	12
2	Tersedianya Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Jumlah Dokumen Pertanggung Jawaban Belanja	Dokumen	12
3	Tersedianya Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Jumlah Dokumen Serapan Anggaran Bulanan	Dokumen	12
4	Terlaksananya survey IKM pada layanan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Laporan	12
5	Tersedianya data pelaporan pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan yang ditugaskan pada aplikasi e-pantau	Jumlah Laporan	Laporan	12
6	Terlaksananya Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Jumlah pelaksanaan Tugas yang di perintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN	Rp. 120,600,000.00	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 120,600,000.00	

Kutai Kartanegara, Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


H. AJI MOHD. RONNY, SE, M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510102001121006


DITA DARINI, S.E
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 198005102011012003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAYANG DIANA MARRYSKA, S.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD JULIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


AKHMAD JULIANSYAH
NIPPPK. 19850116 202521 1 050

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


AKHMAD JULIANSYAH
NIPPPK. 19850116 202521 1 050



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


ARDIANSYAH
NIPPPK. 19840927 202521 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ARDIANSYAH
NIPPPK. 19840927 202521 1 034



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ES VANDIARY DAHLINA, S.T.,M.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ES VANDIARY DAHLINA, S.T., M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510232009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
5	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
6	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 100.000.000,-	APBD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp. 100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 200.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001**



**ES VANDIARY DAHLINA, S.T.,M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510232009022001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FACHRUL ROZI**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


EACHRUL ROZI
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198503172010011024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD (Sesuaiakan	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


FACHRUL ROZI
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198503172010011024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLIANSYAH**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HARLIANSYAH
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198410272010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HARLIANSYAH
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198410272010011022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HJ.EKA VIOLETHA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HJ.EKA VIOLETHA
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197205032000122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HJ. EKA VIOLETHA
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197205032000122003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRVAN FEBRIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


IRVAN FEBRIANSYAH
NIPPPK. 19970818 202521 1 042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


IRVAN FEBRIANSYAH
NIPPPK. 19970818 202521 1 042



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD YUSUF, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MUHAMAD YUSUF, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 196902172006041005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MUHAMAD YUSUF, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 196902172006041005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURFITHAN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MURFITHAN
Pengatur (II/c)
NIP. 197611072010011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MURFITHAN
Pengatur (II/c)
NIP. 197611072010011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR AZIZAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


NUR AZIZAH
NIPPPK. 20000606 202521 2 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


NUR AZIZAH
NIPPPK. 20000606 202521 2 027



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAYANG DIANA MARRYSKA, S.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD JULIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


AKHMAD JULIANSYAH
NIPPPK. 19850116 202521 1 050

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


AKHMAD JULIANSYAH
NIPPPK. 19850116 202521 1 050



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARDIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


ARDIANSYAH
NIPPPK. 19840927 202521 1 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ARDIANSYAH
NIPPPK. 19840927 202521 1 034



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ES VANDIARY DAHLINA, S.T.,M.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ES VANDIARY DAHLINA, S.T., M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510232009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
5	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
6	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 100.000.000,-	APBD
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Rp. 100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 200.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



**RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001**



**ES VANDIARY DAHLINA, S.T.,M.T
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197510232009022001**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FACHRUL ROZI**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


EACHRUL ROZI
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198503172010011024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD (Sesuaikan	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


FACHRUL ROZI
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198503172010011024



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HARLIANSYAH**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HARLIANSYAH
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198410272010011022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HARLIANSYAH
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198410272010011022



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HJ.EKA VIOLETHA**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HJ.EKA VIOLETHA
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197205032000122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


HJ. EKA VIOLETHA
PENGATUR TINGKAT I (II/d)
NIP. 197205032000122003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRVAN FEBRIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


IRVAN FEBRIANSYAH
NIPPPK. 19970818 202521 1 042

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


IRVAN FEBRIANSYAH
NIPPPK. 19970818 202521 1 042



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMAD YUSUF, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MUHAMAD YUSUF, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 196902172006041005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Jf. PERENCANA AHLI MUDA


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MUHAMAD YUSUF, S.Sos
PENATA MUDA (III/a)
NIP. 196902172006041005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MURFITHAN**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MURFITHAN
Pengatur (II/c)
NIP. 197611072010011006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
3	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	1

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


MURFITHAN
Pengatur (II/c)
NIP. 197611072010011006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR AZIZAH**

Jabatan : **PENGADMINISTRASI PERKANTORAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


NUR AZIZAH
NIPPPK. 20000606 202521 2 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


NUR AZIZAH
NIPPPK. 20000606 202521 2 027



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAYANG DIANA MARRYSKA, S.T**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AKHMAD JULIANSYAH**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


AKHMAD JULIANSYAH
NIPPPK. 19850116 202521 1 050



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RINA CITRA, A.MD**

Jabatan : **PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data.
5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.

6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

**PENGELOLA LAYANAN
OPERASIONAL**


RINA CITRA, A.MD
NIPPPK. 19821018 202521 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12
4	Tersedianya Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Arsip Dinamis Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	2

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENGELOLA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001

RINA CITRA, A.MD
NIPPPK. 19821018 202521 2 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL BAHRI.ST**

Jabatan : **PENATA LAYANAN OPERASIONAL**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


SYAIFUL BAHRI, ST
NIPPPK. 19850405 202521 1 039

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

**PENATA LAYANAN
OPERASIONAL**


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


SYAIFUL BAHRI.ST
NIPPPK. 19850405 202521 1 039



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WINDA AGUSTINA, S.Sos**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


WINDA AGUSTINA, S.Sos
PENATA (III/C)
NIP. 198208122006042018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


WINDA AGUSTINA, S.Sos
PENATA (III/C)
NIP. 198208122006042018



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIWIEK WIDYAWATI, S.Sos**

Jabatan : **PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


WIWIEK WIDYAWATI, S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197811252009022001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


WIWIEK WIDYAWATI, S.Sos
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197811252009022001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ZUL CHAIDIR**

Jabatan : **PENGOLAH DATA DAN INFORMASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **RESTU IRAWAN.,S.T**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan capaian kinerja sesuai target yang terdapat dalam Rencana Kerja (Renja), jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Kartanegara pada Unit Kerja tempat saya bertugas.
2. Mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah guna mendukung pencapaian kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan risiko yang dapat menghambat tujuan organisasi.
4. Melaksanakan pengelolaan data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan Satu Data Indonesia guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI


RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


ZUL CHAIDIR
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198007082007011015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
2	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e- Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI



RESTU IRAWAN.,S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001



ZUL CHAIDIR
PENGATURTINGKAT I (II/d)
NIP. 198007082007011015

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN


RESTU IRAWAN, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001


DAYANG DIANA MARRYSKA, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197405192010012003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Terlaksananya Laporan Asistensi dan verifikasi Renja PD dan Perubahan Renja PD	Jumlah Laporan Asistensi Renja dan perubahan Renja PD	Laporan	2
2	Tersedianya Laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Manajemen Risiko pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan pada Perangkat Daerah di bawah koordinasi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
4	Tersedianya Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	1
5	Tersedianya laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah laporan Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah pada Bidang Perencanaan Infrastruktur Kewilayahan	Laporan	1
6	Tersedianya Laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah laporan Kepatuhan Input e-Pantau pada Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Laporan	12

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 150.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 150.000.000,-	

Kutai Kartanegara, 30 Januari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN**

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN



RESTU IRAWAN., S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197902022011011001



DAYANG DIANA MARRYSKA, S.T
PENATA TINGKAT I (III/d)
NIP. 197405192010012003

yang berbasis data.

5. Melaksanakan penyampaian data pada aplikasi e-Pantau secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data.
6. Berkomitmen melaksanakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang dapat dirasakan secara langsung dan memberi dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Perangkat Daerah Pengampu Indikator Kinerja dan Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA BADAN



SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah	Penilaian Kinerja Perencanaan (Komponen SAKIP)	Nilai	21,97
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Nilai	4,01
3	Terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pencapaian kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik.	Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	45
4	Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD	Ketersediaan dokumen Manajemen Risiko pada perangkat daerah per Triwulan	Persen	100
5	Terwujudnya pengelolaan data pemerintah daerah yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan	Tingkat keterisian Data Prioritas Tahunan	Persen	100
6	Terlaksananya Kepatuhan Input e-Pantau	Tingkat Ketepatan waktu input e-Pantau dan telah di verifikasi 100% per tanggal 10 setiap bulan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp27.632.003.424,00	APBD
2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.636.053.618,00	APBD
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp2.400.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp32.668.057.042,00	

Kutai Kartanegara, 2 Januari 2026

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



dr. AULIA RAHMAN BASRI, M. Kes

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA BADAN



**SYARIFAH VANESA VILNA SAVITRY
ISNAWATI SYAFRIL., SE., M.M.**
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 197402171997032004